

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW)

Fitria Ramadayani, Zaili Rusli dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Effectiveness of Implementation of Community Empowerment Program Based on Rukun Warga (PMB-RW). Community Empowerment Program based on Rukun Warga is a program of poverty eradication conducted by Pekanbaru city government through the process of approach of community empowerment pattern with financing from APBD Kota Pekanbaru, Provincial APBD, State Budget, State-Owned Enterprise and Corporate Social Responsibility (CSR) not binding. Therefore, through Mayor Regulation No. 44 of 2014 and Regional Regulation No. 5 of 2016, the community-based community empowerment program (PMB RW) has the goal of creating harmony, security and peace, realizing the prosperity of the people of Pekanbaru City and creating a clean, healthy and beautiful environment. So with that purpose, PMB RW Program has the main target, namely social solidarity, opportunity and employment as well as facilities, infrastructure and environmental sustainability. The method used is descriptive qualitative approach. Primary data obtained from interviews and observations, secondary data obtained through data collection with documents. Data analysis uses data collection methods, triangulation techniques and extends field involvement. The results of the research that the effectiveness of the implementation of PMB RW program in Senapelan sub-district Pekanbaru City is still running quite well. This is influenced by the factors of technical guidance, human resources program implementer and the limitations of program budget.

Keywords: Effectiveness, effectiveness of policy implementation, community based community empowerment program (PMB-RW).

Abstrak: Efektivitas Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, APBN, BUMN, BUMD dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta serta bantuan lain yang tidak mengikat. Oleh karena itu melalui Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) ini memiliki tujuan menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dan menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri. Sehingga dengan tujuan tersebut, Program PMB RW memiliki sasaran pokok, yaitu kesetiakawanan sosial, kesempatan dan lapangan kerja serta sarana, prasarana dan kelestarian lingkungan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dengan dokumen. Analisa data menggunakan metode pengumpulan data, teknik triangulasi serta memperpanjang keterlibatan dilapangan. Hasil penelitian bahwa efektivitas implementasi program PMB RW di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru masih berjalan dengan cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh yaitu faktor bimbingan teknis, faktor SDM implementor program dan faktor keterbatasan anggaran program.

Kata kunci: Efektivitas, efektivitas implementasi kebijakan, program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang begitu cepat dalam

pembangunan berbagai bidang, membuat kota ini harus siap menghadapi segala bentuk resiko yang akan muncul, salah satunya mengenai kemiskinan perkotaan. Pemberda-

yaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai merupakan salah satu solusi dalam upaya menjawab permasalahan kemiskinan perkotaan. Pemerintah Kota Pekanbaru harus mampu menyusun kebijakan dan program yang tepat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Fakta ini selanjutnya direspon oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) Kota Pekanbaru. Oleh karena itu program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) ini memiliki tujuan menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dan menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri. Program PMB RW memiliki sasaran pokok, yaitu kesetiakawanan sosial, kesempatan dan lapangan kerja serta sarana, prasarana dan kelestarian lingkungan. Lingkup kegiatan Program PMB RW yang dituangkan dalam prinsip tridaya meliputi :

1. Pemberdayaan sosial, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat.
2. Pemberdayaan ekonomi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera.
3. Pemberdayaan lingkungan, yaitu gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

Sasaran kegiatan Program PMB RW adalah warga yang terdaftar dan berdomisili wilayah rukun warga LKM-RW. Kegiatan Program PMB RW pada prinsipnya merupakan kegiatan pemberdayaan swadaya masyarakat yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber, yaitu : APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, Program CSR dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Dalam mengimplementasikan Program PMB RW, pemerintah kota menyediakan sarjana pendamping yang nantinya akan bekerja selama satu tahun untuk 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru guna mendampingi

agar tercapainya keberhasilan Program PMB RW. Selanjutnya pengawasan serta pertanggungjawaban dana Program PMB RW ini dilakukan oleh masyarakat langsung serta BPKP yang membina Pemerintah Kota Pekanbaru. Penggunaan dana program ini ditetapkan melalui rapat musyawarah RW. Dalam rapat musyawarah, RW akan menetapkan kemana dan apa yang harus dibangun sesuai keinginan masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) pada dasarnya merupakan ruh dari visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan dan madani yang dimulai dari tingkat RT dan RW. Namun dalam prakteknya masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Program PMB RW yang belum sesuai dengan peruntukkan, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Apalagi pihak implementor juga masih belum mampu mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana efektivitas implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ? *Kedua*, apakah faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ?

Menurut Hasel Nogi (2003) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Sedangkan menurut Grindle (1980) implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dan suatu kebijakan. Kemudian Soluhuddin Kusumanegara (2010) menjelaskan implementasi

merupakan sebagai proses administrasi dari hukum (*statuta*) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Selanjutnya Budi Winarno (2012) mengatakan implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Efektivitas didefinisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Handoko (2011) mengatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka suatu pekerjaan dikatakan tidak efektif.

Menurut Soetrisno (2007) efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator :

1. Pemahaman program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Jadi secara umum pandangan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dimaksudkan atau didefinisikan dalam batas-batas dari tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian diartikan bahwa sejauh mana suatu organisasi dapat merealisasikan tujuannya dalam pencapaian hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini dipilih melalui tehnik *purposive sampling*, yaitu menentukan kelompok peserta yang

menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Informan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : a). informan kunci yaitu LKM-RW (Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga) yaitu Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang Data, Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Ketua Bidang Pemberdayaan Lingkungan dan Ketua Bidang Usaha. b). Informan pelengkap yaitu Tim Koordinasi Kecamatan yaitu Ketua, Tim Fasilitator yaitu pendamping dan masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi dalam upaya memperoleh data primer dan data sekunder. Analisis data penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

HASIL

Pemahaman Program

Pemahaman program adalah kemampuan implementor program dalam mengetahui dengan jelas pelaksanaan program PMB RW yang akan diimplementasikan. Kemampuan setiap implementor dalam memahami dan mengetahui setiap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada Program PMB RW akan membantu terlaksananya program dengan baik. Oleh karena itu, untuk menilai kriteria yang ditetapkan terhadap pemahaman program dalam efektivitas implementasi program PMB RW di Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara penelitian kepada informan kunci penelitian ini yaitu Ketua LKM RW Kelurahan Sago, sebagai berikut :

“Memahami program PMB RW bagi kami, membutuhkan waktu. Karena program ini merupakan program baru yang melibatkan kami secara aktif sebagai pelaksanaanya. Keterbatasan pengetahuan yang kami miliki juga terkadang menjadi kendala dalam menetapkan program PMB RW yang tepat

dan sesuai kebutuhan warga. Sehingga terkadang kami hanya bisa membuat program yang kami ingat dan mudah untuk dilakukan. Selain itu juga program inikan menetapkan ada usulan dan laporan, sebaiknya dilakukan pelatihan teknis oleh Pemko untuk pelaksana program dalam upaya penyusunan usulan dan laporan program. Supaya program ini tepat sasaran dan tepat guna bagi warga". (Wawancara, 4 Oktober 2017)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh informan kunci lainnya, yaitu Ketua Bidang Pemberdayaan Lingkungan Kelurahan Sago, sebagai berikut :

"Kemampuan kami memahami tujuan, sasaran, prinsip, pelaksanaan dan laporan secara membaca aturan mungkin oke...tetapi praktek di lapangan terkadang tidak sesuai dengan pemahaman seperti yang dibaca dalam aturan. Sehingga butuh bimtek dari pihak Pemko untuk bisa melaksanakan program sesuai dengan aturan yang ditetapkan". (Wawancara, 4 Oktober 2017)

Tepat Sasaran

Tepat sasaran adalah kemampuan implementor dalam mengimplementasikan program PMB RW kepada sasaran yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Ketepatan para implementor dalam mengimplementasikan program kepada sasaran yang sudah ditetapkan menjadi langkah yang paling efektif untuk mencapai keberhasilan program. Oleh karena itu, untuk menilai kriteria yang ditetapkan terhadap tepat sasaran dalam efektivitas implementasi program PMB RW di Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara penelitian kepada informan kunci penelitian ini yaitu Sekretaris LKM RW Kelurahan Kampung Baru, sebagai berikut :

"Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan melalui program PMB RW sudah tepat sasaran sesuai dengan peruntukkan program, baik di bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Namun karena keterbatasan anggaran yang

disediakan, kami tidak bisa mengimplementasikan semua peruntukkan program yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk peserta dalam kegiatan yang ditetapkan seperti pelatihan-pelatihan umumnya sudah mewakili warga yang membutuhkan. Walaupun tetap ada beberapa warga yang ikut pelatihan belum sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dana yang dianggarkan tentunya berefek kepada keterbatasan peserta yang bisa diikuti".

(Wawancara 5 Oktober 2017)

Namun jawaban yang berbeda mengenai ketepatan sasaran disampaikan oleh informan pelengkap yaitu masyarakat di Kelurahan Kampung Baru, sebagai berikut :

"Program PMB RW sebenarnya kami kurang begitu mengetahuinya, karena tidak pernah ada sosialisasi tentang program ini kepada kami. Program ini dikerjakan sendiri oleh RW dan perangkatnya, apa saja kegiatan yang akan dibuat juga hanya RW dan koleganya saja yang tahu. Kami warga tidak pernah diajak bermusyawarah tentang peruntukkan program ini, ya...tiba-tiba program ini sudah ada saja. Kegiatan yang berbentuk pelatihan juga kami tidak mengetahuinya dengan pasti. Sebab biasanya yang ikut pelatihan hanya warga-warga yang dekat dengan RW saja. Ya...kadang-kadang memang warga yang membutuhkan, tetapi kebanyakan juga warga yang kurang membutuhkan atau warga yang itu-itu saja yang ikut pelatihan". (Wawancara 5 Oktober 2017)

Tepat Waktu

Tepat waktu adalah kemampuan implementor dalam mengimplementasikan program PMB RW sesuai dengan waktu ditetapkan dalam peraturan. Kemampuan implementor dalam melaksanakan program sesuai dengan waktu yang ditentukan menjadi sesuatu yang penting apabila ingin mengukur ketercapaian atau keberhasilan

program. Oleh karena itu, untuk menilai kriteria yang ditetapkan terhadap tepat waktu dalam efektivitas implementasi program PMB RW di Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara penelitian kepada informan kunci penelitian ini yaitu Ketua LKM RW Kelurahan Padang Terubuk, sebagai berikut :

“Ketepatan waktu dalam setiap melaksanakan program PMB RW sudah kami lakukan sebaik mungkin, karena apabila tidak tercapai maka akan jadi bahan evaluasi bagi pihak Pemerintah Kota untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Tetapi biasanya setiap kegiatan fisik ataupun non fisik terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang sering molor terhadap waktu biasanya penyerahan laporan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan”. (Wawancara 6 Oktober 2017)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan kunci lainnya yaitu Sekretaris LKM RW Kelurahan Padang Terubuk, sebagai berikut :

“Setiap kegiatan yang disetujui untuk lingkungan kami, biasanya akan berjalan dengan tepat waktu. Baik itu kegiatan yang bersifat fisik ataupun non fisik. Kalaupun ada keterlambatan biasanya terjadi karena adanya hambatan-hambatan teknis, seperti kondisi cuaca, pekerja yang mangkir dan sebagainya. Yang jadi masalah bagi kami, biasanya penyerahan laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ini sering sekali terlambat dalam penyerahannya, karena menyusun laporan kegiatan membutuhkan konsistensi dalam mengerjakannya”. (Wawancara 6 Oktober 2017)

Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan adalah kemampuan implementor dalam merealisasikan tujuan program PMB RW yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Setiap program kebijakan pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan ketercapaian tujuan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pelak-

saan program. Oleh karena itu, untuk menilai kriteria yang ditetapkan terhadap tercapainya tujuan dalam efektivitas implementasi program PMB RW di Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara penelitian kepada informan kunci penelitian ini yaitu Ketua Bidang Pemberdayaan Lingkungan Kelurahan Kampung Bandar, sebagai berikut :

“Fokus kami dalam melaksanakan program PMB RW tentunya pada tujuan yang sudah ditetapkan. Karena keberhasilan dalam pencapaian tujuan merupakan kebanggaan bagi kami sebagai pelaksana program. Namun dengan banyaknya tujuan yang harus dicapai, maka kami juga perlu memprioritaskan tujuan mana yang terlebih dahulu akan dicapai. Fokus kami dalam pencapaian tujuan pada kegiatan bidang ekonomi dan lingkungan. Kami mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang bisa merangsang peningkatan ekonomi warga. Kami juga melakukan pembangunan fisik yang bisa menciptakan lingkungan menjadi bersih, sehat dan indah, seperti pembangunan dan perbaikan saluran air parit di lingkungan warga”. (Wawancara 7 Oktober 2017)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan kunci lainnya yaitu Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kelurahan Kampung Bandar, sebagai berikut :

“Kegiatan program PMB RW yang kami lakukan fokus kepada kegiatan di bidang lingkungan dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi kegiatan diarahkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dapat merangsang ekonomi warga, seperti pelatihan menjahit, menyulam, salon, merangkai bunga dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang lingkungan kegiatan diarahkan dalam perbaikan saluran air pada setiap rumah warga”. (Wawancara 7 Oktober 2017)

Perubahan Nyata

Perubahan nyata adalah ketercapaian program PMB RW sesuai dengan *outcome*

yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Setiap program kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pasti memiliki dampak perubahan yang diharapkan. Perubahan-perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi program kebijakan, tentunya perubahan kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk menilai kriteria yang ditetapkan terhadap perubahan nyata dalam efektivitas implementasi program PMB RW di Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara penelitian kepada informan kunci penelitian ini yaitu Ketua LKM RW Kelurahan Kampung Dalam, sebagai berikut :

“Dampak yang diperoleh dari program PMB RW pada dasarnya ada tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan oleh anggaran biaya yang disediakan dalam program PMB RW terbatas. Kami sebagai pelaksana program hanya bisa fokus mengerjakan kegiatan dalam setiap tahunnya pada satu atau dua bidang saja. Misalnya bidang ekonomi, kemampuannya hanya bisa membuat program pelatihan-pelatihan saja tanpa ada tindakan yang nyata dari kegiatan pelatihan tersebut. Kegiatan sosial hanya bisa dilakukan dalam membentuk forum bersama warga tanpa ada kegiatan yang bisa dikelola bersama antara warga. Dalam kegiatan bidang lingkungan juga hanya bisa membangun infrastruktur pada titik-titik tertentu tanpa bisa membangun secara keseluruhan walaupun dengan sistem bertahap”. (Wawancara 8 Oktober 2017)

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh informan kunci lainnya yaitu Sekretaris LKM RW Kelurahan Kampung Dalam, sebagai berikut :

“Kami sudah berusaha melaksanakan program PMB RW sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, namun karena anggaran biaya yang disediakan terbatas dan terus diseleksi dalam setiap tahunnya membuat ada perubahan yang signifikan dari kegiatan yang dilakukan masih sulit untuk terwujud. Karena Pemerintah

Kota masih belum dengan sepenuhnya memberikan program ini kepada pengelola dan terkadang tidak berkelanjutan dalam setiap tahunnya. Akibatnya sulit untuk memperoleh dampak yang baik dari setiap kegiatan yang dilakukan”.

(Wawancara 8 Oktober 2017)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah diperoleh menjelaskan bahwa kemampuan pihak pelaksana program PMB RW dalam memahami program secara teoritis sudah baik tetapi dalam tataran praktis masih belum baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya program PMB RW yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, baik dalam bentuk program infrastruktur ataupun program non infrastruktur. Kekurang kemampuan pelaksana program PMB RW ini tidak terlepas dari bimbingan teknis yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kota dalam upaya mengimplementasikan program dengan efektif.

Oleh karenanya, pemberian bimbingan teknis kepada setiap pelaksana program PMBRW merupakan sesuatu yang penting bagi suksesnya program ini. Modal pengetahuan yang diperoleh, akan sangat membantu pelaksana program PMB RW untuk bisa menyusun laporan pengusulan kegiatan yang akan dilakukan dalam setiap tahunnya. Tentunya bentuk usulan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan rukun warga. Namun sebaliknya apabila bimbingan teknis tidak berjalan atau tidak diberikan oleh Pemerintah Kota, maka tidak semua pelaksana program PMB RW memahami secara teknis pelaksanaan program tersebut. Sebab tidak semua RW yang ada di lingkungan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik untuk bisa memahami program PMB RW yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan. Akibatnya dalam tataran implementasi program PMB RW yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru, masih ditemukan RW yang tidak mam-

pu mengusulkan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara ketepatan sasaran yang dilakukan sudah sesuai dengan peruntukkan program PMB RW yang ditetapkan, tetapi dalam implementasinya belum mampu menyentuh seluruh masyarakat atau warga yang ada di lingkungan rukun warga. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang disediakan melalui program PMB RW yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Keterbatasan anggaran yang diberikan membuat setiap kegiatan yang diperuntukkan untuk setiap bidang pada program PMB RW tidak bisa dilakukan dengan baik.

Ketepatan sasaran program PMB RW yang dilakukan biasanya diukur oleh ketercapaian pelaksanaan program. Misalnya dalam kegiatan infrastruktur, maka ketepatan sasaran adalah terselesainya kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. Contoh dalam kegiatan semenisasi jalan atau pembangunan gorong-gorong, ketepatan sasaran akan tercapai apabila kegiatan pembangunan semenisasi jalan atau gorong-gorong selesai dilakukan dan dimanfaatkan oleh warga. Begitu juga dengan kegiatan yang non infrastruktur dalam bentuk pelatihan-pelatihan, akan tepat sasaran apabila kegiatan tersebut diikuti oleh warga yang ada di lingkungan rukun warga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki warga.

Namun tanggapan yang kontradiktif muncul dari informan pelengkap bahwa ketepatan sasaran dalam implementasi program PMB RW masih belum baik atau efektif. Artinya ketepatan sasaran pelaksanaan program akan diukur dari keterlibatan warga dalam mengikuti program, baik program yang berbentuk infrastruktur ataupun non infrastruktur. Realita yang ada bahwa banyak warga yang tidak mengetahui keberadaan program PMB RW yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui RW di setiap lingkungan rukun warga. Ketidaktahuan warga akan adanya program ini tidak terlepas dari ketiadaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak RW terhadap program

PMB RW kepada warga. Padahal sosialisasi yang dilakukan akan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak RW dalam menyusun dan mengusulkan kegiatan sesuai dengan peruntukkan program. Karena dengan demikian nantinya program PMB RW yang dilakukan di lingkungan rukun warga sesuai dengan kebutuhan warga yang ada di lingkungan tersebut.

Ketepatan waktu para implementor dalam melaksanakan program PMB RW sudah cukup baik, dimana implementor program PMB RW sudah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbentuk fisik ataupun non fisik dengan tepat waktu. Implementor akan selalu berusaha konsisten dalam menyelesaikan setiap kegiatan fisik ataupun non fisik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sebab kegagalan dalam menyelesaikan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ukuran waktu, akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun-tahun berikutnya. Ketepatan waktu implementor dalam menyelesaikan kegiatan akan menjadi ukuran bagi pihak Pemerintah Kota untuk menyetujui kegiatan-kegiatan berikutnya yang diusulkan oleh para implementor program PMB RW. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen bersama diantara para implementor program PMB RW untuk bisa menyelesaikan setiap kegiatan yang sudah disusun, baik dalam bentuk kegiatan fisik ataupun non fisik. Komitmen yang dimiliki akan menjadi modal yang kuat bagi setiap implementor untuk dapat menyelesaikan kegiatan yang direncanakan dengan tepat waktu.

Kendala bagi implementor dalam menyelesaikan kegiatan yang tepat waktu adalah pada proses penyusunan laporan kegiatan yang sudah dilakukan. Hampir setiap pelaksanaan program PMB RW mengeluhkan proses penyusunan laporan penyelesaian kegiatan yang sudah dilakukan, karena tidak semua implementor memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan laporan kegiatan yang telah dilakukan. Faktor lain yang menjadi hambatan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban kegiatan adalah tidak

tidak adanya bimbingan teknis yang diberikan dalam penyusunan laporan yang dibebankan. Padahal bimbingan teknis yang diberikan akan sangat membantu para implementor program PMB RW dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Fokus pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh program PMB RW, lebih diarahkan kepada bidang lingkungan dan ekonomi. Kemampuan para implementor program PMB RW dalam merealisasikan tujuan di bidang lingkungan dan ekonomi tidak terlepas dari ketepatan prioritas yang disusun terhadap kebutuhan masyarakat akan program PMB RW. Fokus ketercapaian tujuan pada bidang lingkungan ditekankan kepada perbaikan dan perawatan saluran air atau parit yang dimiliki oleh warga di lingkungannya. Sebab apabila tidak dilakukan perawatan dan perbaikan maka dapat menciptakan banjir dan genangan air pada saat musim penghujan tiba. Kondisi ini akan membuat lingkungan kehidupan warga menjadi kurang sehat dan tidak bersih. Akibatnya banyak penyakit yang akan muncul apabila keadaan tersebut tidak segera diperbaiki dan dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, pihak implementor program PMB RW lebih menekan pembangunan fisik atau infrastruktur yang dilakukan pada perbaikan saluran air atau parit untuk memperlancar pembuangan air di sekitar lingkungan warga. Kemudian fokus ketercapaian tujuan yang lain adalah di bidang ekonomi, dimana implementor program PMB RW memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya mengembangkan kemampuan warganya untuk bisa merangsang kegiatan ekonomi yang dikelola. Kegiatan pelatihan yang dilakukan memang lebih fokus kepada kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Hal ini disebabkan oleh prinsip yang ingin memberikan ketrampilan dan keahlian kepada kaum perempuan dalam membantu perekonomian keluarga. Oleh karenanya, kegiatan pelatihan yang dilakukan lebih cenderung kepada peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi kaum perempuan seperti pelatihan menjahit, pelatihan merangkai bunga, pelatihan membuat kue, pelatihan me-

nyulam, pelatihan salon dan sebagainya. Sedangkan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kaum laki-laki yang tidak terlalu banyak diberikan dalam peningkatan keahlian di bidang perbengkelan, perikanan dan sebagainya.

Kemampuan implementor dalam mencapai tujuan program PMB RW yang sudah ditetapkan tidak terlepas dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pengelola program PMB RW. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, implementor berusaha untuk merespon dan menampung segala masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga kepada para pengelola program PMB RW. Setiap aspirasi yang disampaikan akan dikelola oleh implementor untuk dijadikan usulan prioritas yang nantinya akan direalisasikan menjadi kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui program PMB RW. Dalam mengelola usulan yang masuk, pihak implementor program PMB RW memang lebih fokus kepada kebutuhan warga yang paling rill, seperti pada bidang ekonomi dan lingkungan. Sehingga nantinya program PMB RW ini dirasakan oleh masyarakat memang dapat membantu dalam memecahkan sebagian permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu dalam melakukan pengusulan program PMB RW kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, pihak implementor akan melakukan musyawarah kepada perwakilan warga seperti RT dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperoleh kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pada lingkungan rukun warganya. Melalui kegiatan musyawarah yang dilakukan, diharapkan setiap usulan kegiatan yang disampaikan merupakan bentuk aspirasi dari seluruh warga masyarakat.

Implementasi program PMB RW belum berjalan dengan efektif, karena program PMB RW yang dilakukan dalam setiap tahunnya belum memberikan dampak perubahan yang nyata dalam kehidupan warga di lingkungan rukun warga. Fakta perubahan yang nyata dirasakan oleh warga hanya pada program kegiatan yang berbentuk fisik atau pembangunan infrastruktur. Kondisi ini disebabkan bahwa pembangunan fisik atau infra-

struktur yang dilakukan barangnya nyata dan bisa dilihat oleh warga masyarakat. Selain itu juga warga masyarakat bisa merasakan langsung dampak perubahan yang terjadi melalui kegiatan pembangunan fisik tersebut. Masyarakat bisa menggunakan langsung apa yang sudah dibangun oleh implementor dalam program PMB RW. Beda halnya dengan pembangunan yang sifatnya non fisik, warga masyarakat tidak bisa merasakan dampak perubahannya secara langsung. Karena membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan dan panjang untuk melihat perubahan yang nyata.

Dari keseluruhan tanggapan informan yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi program PMB RW di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru masih berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator yang sudah berjalan dengan baik dan ada indikator yang berjalan dengan kurang baik.

SIMPULAN

Efektivitas implementasi program PMB RW di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru masih berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator yang sudah berjalan dengan baik dan ada indikator yang berjalan dengan kurang baik. *Pertama*, Indikator pemahaman program ditemukan bahwa pihak pelaksana program PMB RW dalam memahami program secara teoritis sudah baik tetapi dalam tataran praktis masih belum baik. *Kedua*, indikator ketepatan sasaran ditemukan pihak implementor menyatakan bahwa ketepatan sasaran program PMB RW yang dilakukan sudah baik, walaupun dalam prakteknya masih ada beberapa kekurangan-kekurangan dalam pencapaiannya. *Ketiga*, indikator ketepatan waktu ditemukan bahwa ketepatan waktu para implementor dalam melaksanakan program PMB RW sudah cukup baik. *Keempat*, indikator tercapainya tujuan ditemukan bahwa ketercapaian tujuan dalam implementasi program PMB RW di Kecamatan Senapelan sudah berjalan dengan baik atau efektif. Walaupun fokus pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan oleh program PMB RW, lebih diarahkan kepada bidang lingkungan dan ekonomi. *Kelima*, indikator perubahan nyata ditemukan bahwa dampak perubahan nyata yang diharapkan dari implementasi program PMB RW belum berjalan dengan efektif. Implementasi program PMB RW yang dilakukan dalam setiap tahunnya belum memberikan dampak perubahan yang nyata dalam kehidupan warga di lingkungan rukun warga.

DAFTAR RUJUKAN

- Grindle Merike S., 1980., *Policy Content and Context in Implementation Princeton.*, University Press., New Jersey.
- Handoko, T. Hani., 2001., *Manajemen II.*, Yogyakarta: BPFE.
- James E. Anderson., 1979., "Public Policy Making"., New York: Holt, Rinchard & Winston.
- John W. Creswell., 2012., *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumanegara Solahuddin., 2010., *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Tachjan., 2006., *Implementasi Kebijakan Publik.*, Bandung: AIPI.
- Tangkilisan Hassel Nogi., 2003., *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel.*, Yogyakarta: Balairung & Co.
- Winarno Budi., 2012., *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus.*, Jakarta: Pustaka Pelajar.